

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan kesejarahan menunjukan bahwa kehadiran pesantren di negeri ini berawal dari kepemimpinan para wali, mereka yang dibawa penyebaran agama Islam pertama kali. Awalnya, pesantren merupakan pusat penyebaran Islam oleh para wali yang merupakan sambungan sistem *Zawiyah* di India dan Timur Tengah. Berarti para wali itulah yang merintis berdirinya model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang bernama pesantren. Karena itu, pesantren oleh Tilaar disebut sebagai sebuah bentuk pendidikan yang *indigenous*. Karena para wali juga dikenal sebagai tokoh spritual atau bahkan perancang sekenario bagi munculnya kesultanan Islam diberbagai wilayah Nusantara. Maka dapat dibayangkan betapa strategis dan pentingnya kedudukan pesantren saat itu dan saat itulah puncak kekuasaan pemerintah.¹

Sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada ilmu keagamaan, khususnya nahwu-shorrof, tasawwuf, akhlak, dan fiqih,² pesantren tidak jarang juga di ajari dengan ilmu kewirausahaan dan santrinya sendiri yang berperan menjadi produsen karena tidak menutup kemungkinan pesantren membutuhkan dana yang lebih untuk memperlancar setiap kegiatan yang kerjakan di dalam pesantren. Sebagai pengusaha yang sudah dibekali ilmu agama baik akhlak atau sifat yang

¹ Imam Bawani, et.al, *Pesantren Buruh Pabrik*, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang 2011), 45.

² *Ibid.*, 46.

ditanamkan selama di dalam pondok seperti sifat kejujuran haruslah di aplikasikan oleh para santri ketika berada dalam dunia bisnis baik berbisnis yang berkelompok atau individual.

Suatu pekerjaan yang dikelola secara terencana dan teratur sangat disukai oleh Allah SWT. Diibaratkan seperti bangunan yang kokoh oleh para mujahid, saling menguatkan antara yang satu dengan komponen yang lain dalam berorganisasi. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam manajemen, aktivitas yang dilakukan haruslah dilakukan bersama-sama saling membantu saling gotong royong maka itu akan lebih optimal.³

Prinsip kolektifitas dan *ta'āwun* yang disyariatkan dalam ajaran Islam dalam lapangan perekonomian dapat diwujudkan dalam bentuk organisasi koperasi. Kerjasama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling memperkuat dan saling membutuhkan juga mempunyai kepentingan yang sama antara anggota koperasi. Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi yang kokoh, yaitu kolektivitas, tolong-menolong, dan kepentingan yang sama antara para anggota, sehingga anggota dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, yakni kesejahteraan anggota atau mempromosikan ekonomi anggota. Al-qur'an mengisyaratkan bahwa mereka yang bersatu akan menang. Arti menang disini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sudah terwujud seperti kesejahteraan anggotanya. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi adalah prinsip

³ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN-MALANG Prees 2008), 226.

kolektivitas yang diwujudkan dalam ikut sertanya atau tingginya partisipasi dari para anggota koperasi.⁴

Perkembangan koperasi dalam masa pembangunan, TAP MPR Nomor IV Tahun 1973, menegaskan tentang perlunya meningkatkan kegiatan koperasi agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya di dalam tata ekonomi Indonesia. Koperasi merupakan salah satu wadah dan wahana yang sesuai bagi pelaksanaan pembangunan nasional dibidang perekonomian, terutama dalam usaha meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu koperasi sekaligus menjadi suatu organisasi ekonomi yang penting dalam rangka meningkatkan tabungan dan produksi. Koperasi dapat menjadi alat guna memecahkan ketidak selarasan di dalam masyarakat yaitu sebagai organisasi dari masyarakat golongan ekonomi lemah.⁵

Pemahaman tentang pentingnya pengembangan koperasi sebagai badan usaha yang tangguh, yang secara nyata mampu dalam ikut serta mengembangkan aktivitas ekonomi bagi masyarakat perlu dibahas dari dua sisi yang saling terkait yaitu pengembangan bidang ekonomi itu sendiri serta arah pengembangan koperasi. Pengembangan bidang ekonomi secara tegas sangat menginginkan terwujudnya demokrasi ekonomi untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menghindari

⁴ *Ibid.*, 41

⁵ Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003), 106.

terjadinya ketimpangan. Maka diperlukan perhatian yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi rakyat. Selaras dengan arahan pembangunan ekonomi seperti yang dikehendaki ini koperasi diarahkan agar dapat berperan sebagai wadah ekonomi rakyat. Koperasi diarahkan agar dapat berkembang sebagai badan usaha yang sehat sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat.⁶ Sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: “apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jum’ah (62): 10)⁷

Koperasi di Indonesia terdapat dua macam yaitu: koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan ekonomi dan ia melaksanakan aktivitas usahanya dengan cara langsung melayani para anggotanya seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Sedangkan koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi sekunder atau koperasi primer. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Mendirikan koperasi

⁶ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta 2001), 44.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan 2006), 809.

sekunder terdapat berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai induk, pusat, dan gabungan, maka jumlah tingkatan maupun penanamannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.⁸

Berbagai jenis cara untuk berdagang/wirusaha ini harus dipahami benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Muamalah, pada dasarnya semua boleh dilakukan, kecuali yang dilarang yaitu, *maysir*, *gharār*, dan *ribā*. Fenomena demikian tentunya harus diwaspadai, untuk itu *filter* yang berupa moral harus senantiasa dipegang agar dapat menilai apakah cara berdagang tersebut sudah mengarah kepada *fair trade* yang tidak merugikan salah satu pihak atau sebaliknya, karena *unfair trade* tidak sejalan dengan sistem perdagangan yang Islami. Pembelajaran dibidang ekonomi, termasuk perdagangan Islam tidak dianjurkan adanya perlakuan tidak adil terhadap pihak yang lain, yang menyebabkan pihak tersebut merasa terzalimi.⁹

Pembagian koperasi yang didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Secara umum ada lima klasifikasi koperasi yang ada di Indonesia, salah satu diantaranya adalah koperasi dibidang jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum seperti koperasi angkutan, koperasi jasa audit dan lain-lain.¹⁰ Sebagaimana koperasi yang berada di naungan Pondok Pesantren Rusania Malang yaitu koperasi yang bergerak dibidang jasa usaha tebu yang menjadi fasilitator antara Pabrik Gula (PG)

⁸ Abdul Bashit, *Islam dan Manajemen Koperasi*, 102.

⁹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008), 182.

¹⁰ Abdul Basyid, *Islam dan Manajemen Koperasi*, 109.

Krebet dengan para kelompok tani. PG Krebet ini adalah tempat dimana tebu-tebu itu digiling atau produksi menjadi gula. Tidak sedikit gula yang diproduksi akan tetapi beratus-ratus kwintal tebu yang diproduksi oleh Krebet. Koppontren Rusania ini selain bergerak dibidang jasa ada juga dibidang simpan pinjam akan tetapi dibidang ini kurang berjalan secara maksimal, tidak seperti dibidang jasa tebu. Strategi untuk memperlancar kegiatan yang berada di pondok pesantren maka ia membentuk sebuah usaha Koppontren (koperasi pondok pesantren), karena usaha yang dilakukan akan sangat berdampak dalam pengembangan pondok pesantren tersebut, meskipun berada dalam naungan pondok pesantren, koppontren ini bukanlah koperasi syariah. Tetapi usaha yang dilakukan koppontren ini bertujuan untuk memperlancar pengembangan dan meningkatkan aktifitas menjadi lebih baik dan kondusif untuk pesantren.

Maka berdasarkan itulah, yang melatar belakangi penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Praktik Usaha Tebu dalam Koperasi Pondok Pesantren Rusania Tinjauan Fiqih Muamalah”. (Studi Kasus Desa Putukrejo Kec Gondanglegi Kab Malang).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik usaha tebu dalam Koppontren Rusania di Desa Putukrejo Kec. Gondanglegi Kab. Malang

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik usaha tebu dalam Kopontren Rusania di Desa Putukrejo Kec. Gondanglegi Kab. Malang

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan memiliki dua tujuan inti yaitu:

1. Mengetahui praktik usaha tebu dalam Kopontren Rusania di Desa Putukrejo Kec Gondanglegi Kab Malang
2. Mengetahui bagaimana hukum praktik usaha tebu dalam Kopontren Rusania Desa Putukrejo berdasarkan Tinjauan Fiqih Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memperluas wawasan ilmiah untuk penulis pada khususnya dan para pembaca yang lain pada umumnya.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada lembaga Koperasi Pondok Pesantren Rusania.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan koperasi memang bukanlah yang pertama kalinya, sebelumnya sudah ada yang pernah meneliti dengan hal yang berkaitan dengan koperasi, dalam hal ini penulis mengetahui apa

yang belum di teliti dan yang sudah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi.¹¹

1. Skripsi disusun oleh Sanin tahun 2008 *“Eksistensi Koperasi didalam Pembangunan dan Pengembangan Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang Malang)”* skripsi ini meneliti bagaimana koperasi dapat berperan dalam pembangunan dan pengembangan pesantren An-Nur II Bululawang.
2. Skripsi disusun oleh Mujahidin tahun 2012 *“Peranan Koperasi Pondok Pesantren Al-Manar dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”* kripsi ini meneliti tentang peranan koperasi pesantren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.
3. Skripsi disusun oleh Aang Fuad tahun 2009 *“Perencanaan Stategis Usaha Koperasi Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban”* skripsi ini meneliti tentang perencanaan strategi usaha koperasi pesantren langitan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, dan pembahasan akan lebih terinci, maka penulis membuat sistematika pembahasan, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

¹¹ <http://etheses.uin-malang.ac.id/228/5/11220077%20Bab%202.pdf>

BAB II: Landasan teori, yang berisi tentang pengertian koperasi, unsur koperasi, asas koperasi, prinsip koperasi, dan konsep fiqh muamalah.

BAB III: Metode penelitian, metode ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini penulis membahas gambaran umum Koperasi Pondok Pesantren Rusania, visi dan misi sampai stuktur organisasi dan akan membahas persoalan skripsi ini yaitu tentang praktik usaha tebu dalam Koperasi Pondok Pesantren Rusania desa Putukrejo dalam tinjauan Fiqih Muamalah.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan diteliti.